

### BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/23/KEP/413.013/2020

#### **TENTANG**

# TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

#### BUPATI LAMONGAN,

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun Evaluasi 2019 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bupati menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan menyampaikan kepada Dewan dalam Perwakilan Rakyat Daerah paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran penyusunan Laporan Kerterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

## Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

- Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 2015 (Lembaran Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Tahun 2016 Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan, KESATU

:

Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda kerja tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- b. mengundang Perangkat Daerah terkait penjelasan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- c. menghimpun hasil Laporan Perangkat Daerah ke bidang-bidang sesuai dengan mitra Bidangnya;

- d. menyusun konsep bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- e. mengoreksi konsep bahan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- f. melakukan finalisasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati;
- h. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terkait jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna Laporan Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KABU KABU KABU KABU KABU

98801 1 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/23/KEP/413.013/2020 TANGGAL : 2 Januari 2020

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

	T	
NO	KEDUDUKAN	KETERANGAN
	DALAM TIM	
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
		Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
		Lamongan
	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
		Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
		Lamongan
4.	Sekretaris I	Sekretaris Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan
	Sekretaris II	Kepala Bidang Data, Evaluasi dan
		Pelaporan pada Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan
5.	Koordinator I	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Lamongan
	Koordinator II	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan
!		Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Lamongan
	Koordinator III	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
		pada Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kabupaten Lamongan;
		b. Kepala Sub Bagian Program dan
		Evaluasi pada Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan;
		c. Kepala Sub Bagian Keuangan pada
		Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		d. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Lamongan;
		e. Kepala Sub Bidang Pertanian pada
		Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;

1	2	3
	<u> </u>	f. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada
		Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		g. Kepala Sub Bidang Pengembangan
		Usaha pada Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan;
		h. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah
		pada Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		i. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan
		Penanaman Modal pada Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Lamongan;
		j. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
		dan Lingkungan Hidup pada Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Lamongan;
		k. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan
		Kebudayaan pada Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan;
		1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
		pada Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		m.Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada
		Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		n. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
		pada Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		o. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan
		Pelaporan pada Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan; p. Kepala Sub Bidang Program
		Pembangunan pada Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan;
		q. Kepala Sub Bagian Dokumentasi
		Pimpinan pada Bagian Protokol dan
		Komunikasi Pimpinan Sekretariat
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		r. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah
		pada Sekretariat Daerah Dewan
		Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
		Lamongan;
		s. Kepala Sub Bidang Verfikasi pada Badan
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Kabupaten Lamongan;
		t. Narso, Staf pada Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah Kabupaten
		Lamongan;
		u. Yusuf Deny Syaifuddin, A.Md.T, Staf
		pada Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		v. M. Eko Sutis Nurcahyo, Staf pada Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Lamongan;
		w. Alvina Desita, SE, Staf pada Badan
		Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan seguai dengan aslinya

bala Bagian Hukum,

NIP. 198801 1 001